TRIBUN PONTIANAK

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2022 | Hal.: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Lasarus: Bandara Rahadi Oesman Diperpanjang 250 M

■ Dua Bupati Sepakati Rencana Bandara Baru

KETAPANG, TRIBUN - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pertemuan dengan Bupati Ketapang dan Bupati Kayong Utara terkait persoalan bandara, sudah ada penetapan lokasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan RI.

"Terkait bandara Rahadi Oesman, tadi malam sudah kita sepakati. Kita akan melakukan optimalisasi dulu bandara yang ada sekarang, sembari kita masih menunggu pembebasan lahan baru itu selesai," kata Lasarus dalam coffee morning di Water Park Ketapang, Jumat (13/5).

Lasarus menjelaskan, bahwa pihak Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan penetapan lokasi untuk lokasi pembangunan bandara baru.

"Kemarin kita sudah bertemu dengan Bupati Kayong Utara, terkait lahan lokasi bandara yang baru. Dari 190 hektare lahan yang akan dibebaskan, tinggal kurang lebih 40 hektare lagi lahan yang belum selesai," jelasnya.

Namun, kata Lasarus, lahan 40 hektare ini posisinya tidak lurus. Sehingga belum bisa dianggarkan dalam waktu dekat. "Karena harus dipastikan dulu bandara ini selesai pembebasan lahannya, nanti baru kita alokasikan anggarannya," tandasnya.

Untuk itu, Lasarus mengatakan akan melakukan pengoptimalan bandara rahadi oesman di lokasi saat ini guna keselamatan penerbangan dengan menambah panjang landasan pacu.

"Sementara kondisi Bandara Ketapang ini off cycle nya (diluar siklus) ada di dua kepala runway. Akhirnya tadi malam disepakati dengan Bupati Ketapang yang ke arah klinik itu sepertinya yang nanti akan dibebaskan oleh Pemda, sehingga runway ini bisa diperpanjang kurang lebih 250 meter," terangnya.

"Kalau sudah 250 meter dipanjangkan ke sana (arah klinik) diharapkan bisa menghindari Hotel Aston itu, agar pada saat pesawat turun bisa menghindari Hotel Aston secara maksimal sehingga bisa menjamin keselamatan penerbangan di bandara sini," timpalnya.

Sedangkan mengenai pembebasan lahan nanti, akan dilaksanakan oleh Pemda Ketapang. Namun, untuk infrastruktur tetap dari Pemerintah Pusat melalui APBN.

"Terkait pelaksanaannya tahun ini sebenarnya sudah bisa mulai, namun karena belum dibebaskan pastinya di tahun 2023 semua tergantung pemerintah daerah kapan selesai pembebasannya," ujarnya.

Sedangkan mengenai kondisi jalan, Ketua DPD PDIP Kalbar ini meminta fraksinya untuk segera mengajukan pada saat rapat anggaran di provinsi.

"Terkait jalan pasti, saya sudah pesan sama fraksi untuk dibahas di dalam rapat-rapat anggaran di provinsi bahwa terkait jalan ini harus segera diperbaiki karena itu satu-satunya ibu kota kabupaten (Kayong Utara) yang akses jalannya masih sangat-sangat tidak layak," pungkasnya. **(nur)**

TRIBUN/NUR IMAM SATRIA

Lasarus

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat